

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN ANALISIS TABEL I-O TAHUN 2005: STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(The Development Plans Based on Input Output Table Analysis Year 2005:
Case Study in The Province of Bangka Belitung)

Rita Helbra Tenrini*

*Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan,
email: rita.helbra@gmail.com.

Naskah diterima: 01 Februari 2013

Naskah direvisi: 15 Maret 2013

Naskah diterbitkan: 31 Desember 2013

Abstract

This study wants to evaluate the development plans in the province of Bangka Belitung using Input Output (I-O) Table analysis year 2005. Research method using quantitative descriptive analysis, which comes from secondary data, documents and literature related to this study. This study use the analysis of Indeks Daya Penyebaran (IDP) or forward linkages effect ratio and Indeks Derajat Kepekaan (IDK) or backward linkages effect ratio, that came from the processing of I-O table. From the processing of I-O table there are 4 key sectors that have the IDP and IDK above average (> 1), namely: (i) building; (ii) iron and steel industry; (iii) building business and corporate services; and (iv) communication. Meanwhile the leading sectors that have been concerned in the mission of regional development period 2007-2012 in the province of Bangka Belitung known as Dasa Bhakti Era EMAS are: (i) marine, (ii) mining and energy, (iii) industry and trade, and (iv) banking and investment. The implications of this study, it is expected that regional governments in determining regional development plans contained in the APBD, should use the information that came from the processing of I-O table. If the regional government focus their spending on sectors that became a key sector in the economy according to I-O table analysis, then the quality of spending will increase and create more added value and greater multiplier effect on the economy.

Keywords: the development plans, spending, quality, Input Output table, key sectors

ABSTRAK

Penelitian ini ingin mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bangka Belitung menggunakan analisa Tabel Input Output (I-O) Tahun 2005. Metode penelitian menggunakan analisa kuantitatif deskriptif, yang berasal dari data sekunder, dokumen dan literatur yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau *forward linkages effect ratio* dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau *backward linkages effect ratio*, yang berasal dari pengolahan Tabel I-O. Dari pengolahan Tabel I-O terdapat 4 sektor kunci yang memiliki IDP dan IDK di atas rata-rata (>1) yaitu: (a) bangunan, (b) industri besi dan baja, (c) usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan (d) komunikasi. Sementara itu sektor unggulan yang ditetapkan dalam Misi Pembangunan Daerah periode 2007-2012 di Provinsi Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Dasa Bhakti Era EMAS adalah (a) kelautan, (b) pertambangan dan energi, (c) perindustrian dan perdagangan, dan (d) perbankan dan penanaman modal. Implikasi dari penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dalam menetapkan perencanaan pembangunan daerah yang terdapat dalam APBD sebaiknya menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan Tabel I-O. Jika pemerintah daerah memfokuskan belanja daerah pada sektor-sektor yang menjadi sektor kunci dalam perekonomian sesuai dengan analisa Tabel I-O, maka kualitas belanja daerah akan meningkat dan menciptakan nilai tambah yang lebih dan *multiplier effect* yang lebih besar dalam perekonomian.

Kata kunci: perencanaan pembangunan, belanja, kualitas, tabel Input Output, sektor kunci

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, dengan definisi bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.¹ Dalam mewujudkan misi tersebut, program pembangunan pada periode tahun 2010-2014 tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan pada

periode sebelumnya dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran dan kebijakan.

Setiap tahunnya pemerintah melaksanakan kewajiban konstitusinya melalui penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Buku III Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah dan Antar Daerah*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2010).

Tabel 1. Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2007-2012

(Miliar Rupiah)

URAIAN	2007 (LKPP)	2008 (LKPP)	2009 (LKPP)	2010 (LKPP)	2011 (LKPP)	2012 (APBN-P)
I. Dana Perimbangan	243.967,2	278.714,6	287.251,4	316.711,3	347.246,2	408.352,0
a. Dana Bagi Hasil	62.942,0	78.420,2	76.129,9	92.183,5	96.909,0	108.421,7
b. Dana Alokasi Umum	164.787,4	179.507,1	186.414,1	203.571,5	225.533,7	273.814,4
c. Dana Alokasi Khusus	16.237,8	20.787,3	24.707,4	20.956,3	24.803,5	26.115,9
II. Dana Otsus dan Penyesuaian	9.296,0	13.718,8	21.333,8	28.016,3	64.078,5	70.423,9
a. Dana Otonomi Khusus	4.045,7	7.510,3	9.526,6	9.099,6	10.421,3	11.952,6
b. Dana Penyesuaian	5.250,3	6.208,5	11.807,2	18.916,7	53.657,2	58.471,3
Jumlah	253.263,2	292.433,4	308.585,2	344.727,6	411.324,7	478.775,9

Sumber: RAPBN 2013, Kementerian Keuangan.

ke empat disebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Penyusunan RAPBN tahun 2013 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013. Dengan berpedoman terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, maka rencana kegiatan dan program yang masuk dalam RUU APBN merupakan hasil penjabaran dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.³

Dalam RAPBN tahun 2013 disebutkan bahwa kebijakan pendapatan negara tahun 2013 diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari bidang perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di sisi belanja negara, esensi strategi belanja negara pada tahun 2013, baik belanja kementerian negara/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L tetap diarahkan pada strategi empat pilar, yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (*pro growth*); (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro job*); (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro poor*); dan (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*).

Dalam RAPBN tahun 2013 disebutkan pula di sisi belanja negara, dalam jangka menengah, peningkatan kualitas belanja negara akan terus diupayakan oleh pemerintah untuk menciptakan belanja negara yang lebih produktif, antisipatif, dan responsif. Hal ini

dilakukan untuk merespon gejala perekonomian, menjawab tantangan, sekaligus mendukung optimalisasi pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Perbaikan kualitas belanja daerah (*quality of spending*) juga diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah sehingga sumber-sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program dan kegiatan yang mempunyai nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

Sejak dimulainya otonomi daerah tahun 2001, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal adalah kebijakan transfer ke daerah. Perkembangan transfer ke daerah tahun 2007-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 dapat kita lihat bahwa transfer ke daerah dari tahun 2007 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan secara nominal. Tahun 2007 sebesar Rp253.263,2 miliar meningkat menjadi Rp478.775,9 miliar pada tahun 2012 atau hampir dua kali lipat. Proporsi terbesar adalah transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang besarnya telah ditetapkan yaitu 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri.

Implementasi kebijakan fiskal di tingkat daerah diwujudkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan sarana bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya. Pelaksanaan program yang terdapat dalam APBD hendaknya memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah, yaitu melalui kebijakan di sisi pendapatan maupun belanja daerah. Alokasi belanja yang terdapat dalam APBD sebaiknya dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Kualitas belanja daerah merupakan isu yang selalu mengemuka selama satu dasawarsa terakhir

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat.

³ Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

ini. Dalam NK & RAPBN tahun 2013 disebutkan bahwa masih ada sebagian daerah yang memperoleh opini yang kurang baik dari BPK atas audit laporan keuangannya, adanya struktur belanja yang kurang sehat karena banyak tersedot untuk belanja aparatur, dan penyerapan anggaran yang kurang optimal sehingga menimbulkan adanya SiLPA yang berlebihan meskipun di sisi lain kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik tidak terpenuhi.

Belanja daerah yang berkualitas yang memberikan nilai tambah yang besar terhadap masyarakat dan dampak terhadap peningkatan perekonomian daerah, dibutuhkan untuk dapat mewujudkan visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Terkait dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “Belanja Daerah Berkualitas, Analisis Tabel IO Tahun 2005, Studi Kasus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor usaha manakah yang memiliki nilai Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau tingkat dampak keterkaitan ke depan (*forward linkage effect ratio*) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect ratio*), di atas rata-rata (>1), berdasarkan analisis Tabel Input-Output (I-O) tahun 2005 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Sektor usaha manakah yang memiliki nilai IDP dan IDK di atas rata-rata (>1) sebagai sektor kunci (*key sectors*) berdasarkan analisis Tabel I-O tahun 2005 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan apakah telah sesuai dengan sektor unggulan yang ditetapkan dalam misi pembangunan daerah?

C. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah dapat diketahui tujuan dari pembuatan kajian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sektor usaha yang memiliki nilai Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau tingkat dampak keterkaitan ke depan (*forward linkage effect ratio*) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect ratio*), di atas rata-rata (>1), berdasarkan analisis Tabel I-O tahun 2005 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Mengetahui sektor usaha yang memiliki nilai IDP dan IDK di atas rata-rata (>1) atau dalam analisis pengolahan Tabel I-O disebut sebagai sektor kunci (*key sectors*) berdasarkan analisis Tabel I-O tahun 2005 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan membandingkannya dengan sektor unggulan yang ditetapkan dalam misi pembangunan daerah.

II. KERANGKA TEORI

A. Analisis Tabel Input Output (Tabel I-O)

1. Prinsip Dasar

Tabel I-O dan analisisnya pertama kali dikembangkan oleh Professor Wassily Leontief pada akhir dekade tahun 1930an. Dalam perkembangannya, sampai saat ini metode-metode yang digunakan pada Tabel I-O semakin banyak diterapkan sebagai alat analisis dan perencanaan yang praktis dan bersifat kuantitatif.⁴

Model I-O telah banyak diimplementasikan pada analisis ekonomi. Analisis dampak ekonomi dari pariwisata, APBN dan ekspor, serta dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penggunaan sumber daya alam, teknologi dan lingkungan banyak dilakukan dengan menggunakan model I-O.

Badan Pusat Statistik menyusun Tabel I-O Indonesia secara berkala setiap lima tahun sekali, dan hingga kini telah disusun Tabel I-O untuk tahun 1971, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, dan 2005. Tabel I-O merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Tabel I-O Indonesia disusun dengan maksud untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian di Indonesia secara menyeluruh.

Kerangka dasar model I-O terdiri atas empat kuadran seperti disajikan pada Gambar 1. Kuadran I, menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Kuadran ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi. Penggunaan atau konsumsi barang dan jasa disini adalah penggunaan untuk diproses kembali, baik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Karenanya transaksi yang digambarkan dalam kuadran pertama ini disebut juga transaksi antara (*intermediate transaction*).

Kuadran II, menunjukkan permintaan akhir (*final demand*) dan impor, serta menggambarkan penyediaan barang dan jasa. Penggunaan barang

⁴ Badan Pusat Statistik, *Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008).

dan jasa bukan untuk proses produksi digolongkan sebagai permintaan akhir. Permintaan akhir ini biasanya terdiri atas konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor.

Kuadran III, memperlihatkan input primer dari sektor-sektor produksi. Input ini dikatakan primer karena bukan merupakan bagian dari output suatu sektor produksi seperti pada kuadran pertama dan kedua. Input primer adalah semua balas jasa setiap faktor produksi yang biasanya meliputi upah dan gaji, surplus usaha, ditambah penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Kuadran IV, memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Informasi di kuadran keempat ini bukan merupakan tujuan pokok, sehingga dalam penyusunan Tabel I-O kadang-kadang diabaikan. Demikian juga penyusunan Tabel I-O di Indonesia mengabaikan kuadran keempat ini. Informasi secara rinci disajikan dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).

Kerangka umum Tabel I-O disajikan pada gambar berikut ini:

I (nxn) Transaksi antar sektor/ kegiatan	II (nxm) Permintaan akhir
III (pxn) Input primer	IV (pxm)

Sumber: Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input Output, BPS 2008.

Gambar 1. Kerangka Umum Tabel Input-Output

Tiap kuadran dinyatakan dalam bentuk matriks, masing-masing dengan dimensi seperti tertera pada Gambar 2. Bentuk seluruh matriks ini menunjukkan

kerangka model I-O yang berisi uraian statistik mengenai transaksi barang dan jasa antar berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Kumpulan sektor produksi pada kuadran pertama, yang berisi kelompok produsen, memanfaatkan berbagai sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa yang secara makro disebut sebagai sistem produksi. Sektor di dalam sistem produksi ini dinamakan sektor endogen. Sedangkan sektor di luar sistem produksi, yaitu yang berada di kuadran kedua, ketiga dan keempat dinamakan sektor eksogen. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas bahwa model I-O membedakan dengan tegas sektor endogen dengan sektor eksogen.

Output, selain digunakan dalam sistem produksi dalam bentuk permintaan antara, juga digunakan di luar sistem produksi dalam bentuk permintaan akhir. Input yang digunakan dalam sistem produksi ada yang berasal dari dalam sistem produksi berupa input antara dan juga ada yang berasal dari luar sistem produksi yang disebut input primer.

Ilustrasi Tabel Input Output untuk sistem perekonomian dengan tiga sektor produksi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:

Dari Tabel I-O pada gambar 2 dapat dibuat dua persamaan neraca yang berimbang:

$$\text{Baris : } \sum_{j=1}^n X_{ij} + F_i = X_i$$

$$\text{Kolom : } \sum_{i=1}^n X_{ij} + V_j = X_j$$

Di mana :

X_{ij} = nilai aliran barang atau jasa dari sektor i ke sektor j .

F_i = total konsumsi akhir.

V_j = nilai tambah.

Struktur Input		Alokasi Output			Permintaan Antara			Permintaan Akhir	Jumlah Output	
		Sektor Produksi								
		1	2	3	1	2	3			
Input Antara	Sektor Produksi	1	X_{11}	X_{12}	X_{13}				F_1	X_1
		2	X_{21}	X_{22}	X_{23}				F_2	X_2
		3	X_{31}	X_{32}	X_{33}				F_3	X_3
Input Primer			V_1	V_2	V_3					
Jumlah Input			X_1	X_2	X_3					

Sumber: Buku Tabel Input Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005, BPS 2006.

Gambar 2. Tabel Input Output untuk Sistem Perekonomian dengan Tiga Sektor Produksi

Definisi neraca yang berimbang adalah jumlah produksi (keluaran) sama dengan jumlah masukan.

2. Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan

Salah satu keunggulan analisis dengan model I-O adalah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat hubungan atau keterkaitan antar sektor produksi. Ada tingkat keterkaitan teknis antara unsur aktif (dalam hal ini unsur yang menunjang kegiatan industri/ekonomi, seperti perusahaan industri, prasarana, pelabuhan, dan pemusatan industri) yang merupakan generator untuk memulai sesuatu proses polarisasi teknis.

Hubungan teknis ini dapat berupa (1) hubungan ke depan (*forward linkage*) ialah hubungan dengan penjualan barang jadi; (2) hubungan ke belakang (*backward linkage*) yang hampir selalu merupakan hubungan dengan bahan mentah ataupun bahan baku. Jadi, besarnya tingkat keterkaitan ini juga bisa dilihat dari dua sisi, yaitu tingkat keterkaitan ke depan (*forward linkage*) atau disebut juga daya penyebaran dan tingkat keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) atau biasa disebut derajat kepekaan.

Dari daya penyebaran dan derajat kepekaan ini diturunkan pula IDP dan IDK. Bahkan selama ini banyak para ahli telah menggunakan kedua indeks tersebut untuk menganalisis dan menentukan sektor-sektor kunci (*key sectors*) yang akan dikembangkan dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

Sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau daya dorong yang cukup kuat dibandingkan terhadap sektor yang lainnya. Sebaliknya, sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi berarti sektor tersebut mempunyai ketergantungan (kepekaan) yang tinggi terhadap sektor lain.

Hasil perhitungan IDP menyatakan bahwa sektor-sektor yang mempunyai IDP lebih besar dari satu berarti daya penyebaran sektor tersebut di atas rata-rata daya penyebaran secara keseluruhan. Pengertian yang sama juga berlaku untuk IDK, di mana sektor yang mempunyai IDK lebih dari satu berarti derajat kepekaan sektor tersebut di atas derajat kepekaan rata-rata secara keseluruhan.

B. Profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Geografi

Profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh dari *website* Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil. Provinsi Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000

tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Ibukota provinsi ini adalah Pangkalpinang.⁵

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara administratif terbagi dalam 6 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Bangka (2.950,68 km²), Kabupaten Bangka Barat (2.820,61 km²), Kabupaten Bangka Tengah (2.155,77 km²), Kabupaten Bangka Selatan (3.607,08 km²), Kabupaten Belitung (2.293,69 km²), Kabupaten Belitung Timur (2.506,91 km²), dan Kota Pangkalpinang (89,40 km²).

2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk (SP2010) sebesar 1.261.737 jiwa, jumlah ini bertambah 3,14 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 1.223.296 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2011 sebanyak 655.051 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 606.686 jiwa.

Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2000-2010 sebesar 3,14 persen. Jika ditinjau menurut kabupaten/kota untuk periode tahun 2000-2010, tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka Tengah 3,81 persen, dan terendah di Kabupaten Belitung Timur 2,76 persen.

Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2011 sebesar 68,43 persen artinya 68 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Penduduk usia kerja yang bekerja apabila dilihat dari sektor lapangan pekerjaan tampak bahwa sebesar 25,93 persen penduduk usia kerja yang bekerja terserap di sektor pertanian, 18,98 persen terserap di sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan 15,51 persen di sektor jasa kemasyarakatan.

3. Sosial Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

⁵ "Selayang Pandang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", (<http://www.babelprov.go.id/>), diakses 13 Maret 2013).

Pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan migas mengalami peningkatan dari Rp26.565.032 juta pada tahun 2010 menjadi Rp30.254.777 juta pada tahun 2011. Sedangkan PDRB tanpa migas juga mengalami peningkatan dari Rp25.959.503 juta di tahun 2010 menjadi Rp29.620.050 juta di tahun 2011.

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dengan migas adalah 6,40 persen dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah 6,47 persen.

Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011 kontribusi terbesarnya berasal dari sektor tersier dengan kontribusi sebesar 35,85 persen. Sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,18 persen), sektor pengangkutan dan komunikasi (3,27 persen), sektor keuangan *real estate* dan jasa perusahaan (2,61 persen), dan sektor jasa-jasa (10,79 persen). Penopang kedua adalah sektor primer dengan kontribusi 35,14 persen yang meliputi sektor pertanian (18,41 persen) dan sektor pertambangan dan penggalian (16,73 persen). Sedangkan kontribusi terkecil adalah sektor sekunder sebesar 29,01 persen yang terdiri dari sektor industri pengolahan (20,56 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (0,67 persen), dan sektor konstruksi (7,78 persen). Dilihat dari sisi pengeluaran, PDRB atas dasar harga berlaku terbesar digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 51,56 persen.

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2011, PDRB per kapita penduduk berdasarkan harga berlaku di wilayah ini dengan migas sebesar Rp23.978.672, sedangkan tanpa migas sebesar Rp23.475.613. Jika dibandingkan tahun 2010, pendapatan per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan.

C. Belanja Daerah Berkualitas

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menetapkan belanja berkualitas sebagai tema utama yang akan disampaikan dalam pembacaan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dijelaskan bahwa belanja berkualitas

yang dimaksud adalah menggunakan anggaran belanja negara untuk keperluan yang produktif. Dana belanja dialokasikan kepada barang-barang yang memberi nilai tambah.⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa upaya peningkatan belanja yang berkualitas untuk mewujudkan kondisi fiskal sehat dan berkesinambungan harus memenuhi tiga unsur efisiensi, yaitu efisiensi alokasi, efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Efisiensi alokasi pada dasarnya menekankan perlunya alokasi anggaran yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil serta diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan nilai tambah dan manfaat luas bagi masyarakat. Efisiensi teknis lebih menekankan agar proses pelaksanaan anggaran dapat direalisasikan sesuai dengan rencana dan menghasilkan output yang berkualitas. Sementara efisiensi ekonomi lebih menekankan pentingnya menjaga agar output yang dihasilkan sesuai dengan besaran anggaran yang dikeluarkan.⁷

Dalam tulisannya di *The Strait Times*, Vinod Thomas menyebutkan bahwa:⁸

"...sustained recovery relies not only on the amount of spending but also on its quality...To generate economic growth, the stimulus spending needs to be directed to high-productivity areas. The Asian experience shows that channelling outlays to finish infrastructure projects has higher payoffs than providing untargeted subsidies, be it for energy or food.."

Proses pemulihan yang berkesinambungan dalam menghadapi krisis perekonomian tidak hanya bergantung pada besarnya belanja pemerintah, akan tetapi kualitas dari belanja itu sendiri. Untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, stimulus belanja diharapkan untuk dialokasikan ke bidang yang produktivitasnya tinggi.

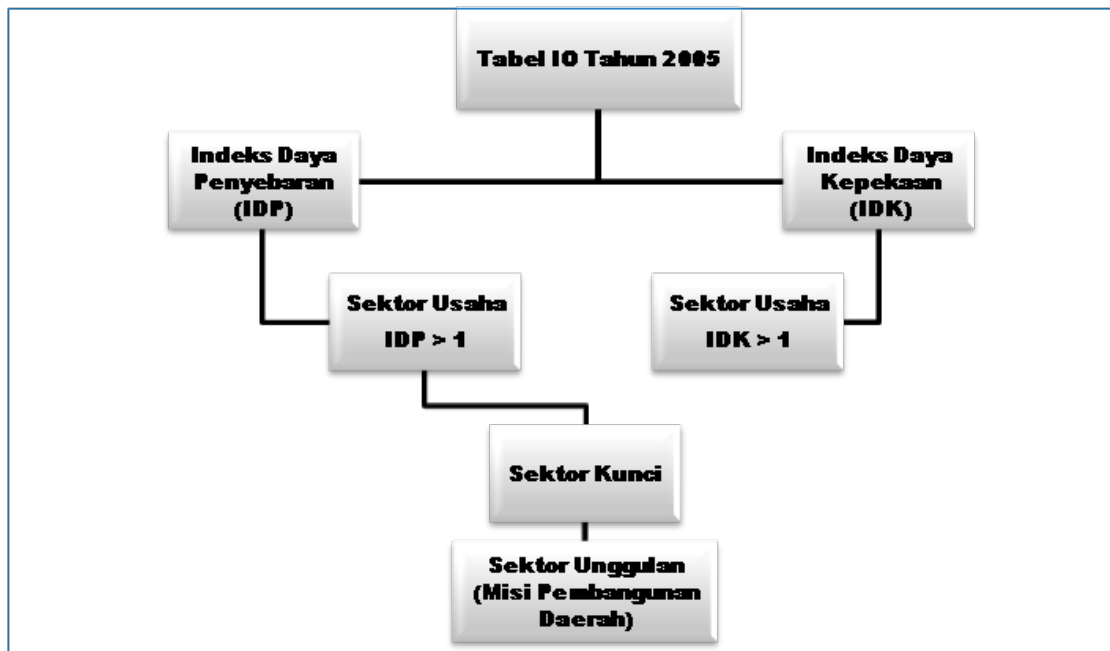
III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data Tabel I-O tahun 2005 berdasarkan klasifikasi 45 sektor usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data tahun 2005 digunakan dalam penelitian ini karena data Tabel I-O setelah tahun 2005 belum tersedia. Data

⁶ "Menkeu Tetapkan Belanja Berkualitas dalam RAPBN 2013", (http://www.analisadaily.com/news/read/2012/08/15/68915/menkeu_tetapkan_belanja_berkualitas_dalam_rapbn_2013/), diakses 23 Januari 2013).

⁷ "Belanja Berkualitas Harus Penuhi 3 Unsur Efisiensi", (http://www.investor.co.id/home/belanja-berkualitas-harus-penuhi-3-unsur-efisiensi/49114#Scene_1), diakses 23 Januari 2013).

⁸ Vinod Thomas. "The Quality of Public Service Operation", (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=193>), diakses 25 September 2013). *Spending*. The Straits Times 24 November 2009. (http://siteresources.worldbank.org/EXTDIRGEN/Resources/StraitsTimes_QualityofSpending.pdf), diakses 14 Maret 2013).



Gambar 3. Tahapan Pengolahan Data

yang digunakan adalah data sekunder, dengan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga dari studi literatur dan dokumen-dokumen yang ada. Untuk mengetahui sektor unggulan dan sektor kunci digunakan metode penelitian analisis kuantitatif yaitu analisis IDP atau *forward linkages effect ratio* dan IDK atau *backward linkages effect ratio* dari hasil pengolahan Tabel I-O.

Tahapan pengolahan data dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Tahapan pada Gambar 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengolahan Tabel I-O tahun 2005 didapatkan nilai IDP dan IDK masing-masing sektor usaha.
2. Diidentifikasi sektor usaha yang nilai IDP atau tingkat dampak keterkaitan ke depan (*forward linkage effect ratio*) di atas 1.
3. Diidentifikasi sektor usaha yang nilai IDK atau tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect ratio*) di atas 1.
4. Diidentifikasi sektor usaha kunci (*key sectors*) yang nilai IDP dan IDKnya di atas 1.
5. Dibandingkan antara sektor usaha kunci yang diperoleh dari pengolahan Tabel I-O dan sektor usaha unggulan yang terdapat dalam Misi Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Struktur Output

Output merupakan nilai produksi (baik barang maupun jasa) yang dihasilkan oleh sektor-sektor

ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan mengetahui besaran output yang diciptakan masing-masing sektor, maka dapat diketahui pula sektor-sektor mana yang memberikan sumbangan yang besar dalam pembentukan output secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁹ Sepuluh sektor terbesar menurut peringkat output tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa sektor usaha dengan proporsi paling besar menurut struktur output adalah sektor industri peleburan timah yang memiliki nilai output Rp8.604 miliar dengan persentase sebesar 29,27 persen. Urutan kedua adalah sektor usaha penambangan timah yang memiliki nilai output Rp5.130 miliar dengan persentase sebesar 17,45 persen. Urutan ketiga adalah sektor usaha perdagangan dengan nilai output sebesar Rp2.680 miliar, besarnya persentase adalah 9,12 persen. Urutan keempat adalah sektor usaha bangunan yang memiliki nilai output sebesar Rp2.184 miliar dengan persentase sebesar 7,43 persen. Urutan kelima adalah sektor usaha perikanan yang memiliki nilai output sebesar Rp1.211 miliar dengan persentase sebesar 4,12 persen.

Urutan keenam sampai dengan sepuluh berturut-turut adalah sektor usaha pertambangan dan penggalian lainnya, sektor usaha industri minyak dan lemak, sektor usaha kelapa sawit, sektor usaha pemerintahan umum dan pertahanan dan sektor usaha usaha bangunan dan jasa perusahaan lainnya.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Tabel Input Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005*, (Pangkalpinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2006).

Tabel 2. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Peringkat Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005

Peringkat	Kode	Sektor	Nilai (Rp. Juta)	Distribusi (Persen)
1	26	Industri Peleburan Timah	8.604.759	29,27
2	11	Penambangan Timah	5.130.925	17,45
3	31	Perdagangan	2.680.470	9,12
4	30	Bangunan	2.184.548	7,43
5	10	Perikanan	1.211.412	4,12
6	12	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.206.100	4,10
7	14	Industri Minyak dan Lemak	1.074.397	3,65
8	5	Kelapa Sawit	904.376	3,08
9	41	Pemerintah Umum dan Pertahanan	644.627	2,19
10	40	Usaha Bangunan dan Jasa Perusahaan Lainnya	615.901	2,10
		Lainnya	5.138.726	17,48
		Jumlah	29.396.241	100,00

Sumber: Buku Tabel Input Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005, BPS 2006.

2. Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK)

IDP dan IDK dapat digunakan untuk menganalisis dan menentukan sektor-sektor kunci (*key sectors*) yang akan dikembangkan pembangunan ekonomi di wilayah tertentu. Besarnya keterkaitan bisa dilihat dari dua sisi, yaitu tingkat dampak keterkaitan ke depan (*forward linkages effect ratio*) atau disebut juga IDP dan tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkages effect ratio*) atau biasa disebut IDK.

Sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut memberikan pengaruh kepada sektor lain, sementara sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi berarti sektor tersebut akan cepat terpengaruh bila terjadi perubahan pada sektor lainnya.

a) Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau *Forward Linkage Effect Ratio*

Jenis keterkaitan ini menghitung total output yang tercipta akibat meningkatnya output suatu sektor melalui mekanisme penggunaan input produksi. Peningkatan output sektor tertentu akan mengakibatkan peningkatan output sektor-sektor lainnya. Peningkatan output tersebut akan menyebabkan peningkatan permintaan input sektor tersebut. Input sektor tersebut ada yang berasal dari sektor itu sendiri, ada pula yang berasal dari sektor lain.

Sepuluh sektor utama dengan IDP tertinggi menurut analisis Tabel I-O tahun 2005 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Sepuluh Sektor Utama Menurut Indeks Daya Penyebaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005

Peringkat	Kode	Sektor	IDP
1	26	Industri Peleburan Timah	1,4595
2	15	Industri Penggilingan Padi	1,4000
3	13	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan	1,3812
4	14	Industri Minyak dan Lemak	1,3740
5	17	Industri Kerupuk	1,3156
6	16	Industri Penggilingan Lada	1,2905
7	30	Bangunan	1,2705
8	23	Industri Batu Bata dan Genteng dari Tanah Liat	1,2066
9	38	Komunikasi	1,1657
10	40	Usaha Bangunan dan Jasa Perusahaan	1,1495

Sumber: Buku Tabel Input Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005, BPS 2006.

Dari Tabel 3 dapat kita lihat bahwa sektor usaha industri peleburan timah memiliki IDP tertinggi sebesar 1,4595, kemudian sektor usaha industri penggilingan padi sebesar 1,4, sektor usaha industri pengolahan dan pengawetan ikan sebesar 1,3812, sektor usaha industri minyak dan lemak sebesar 1,3740, kemudian sektor usaha industri kerupuk sebesar 1,3156. Selanjutnya IDP terbesar peringkat 6 sampai dengan 10 adalah sektor usaha industri penggilingan lada, sektor usaha bangunan, sektor usaha industri batu bata dan genteng dari tanah liat, sektor usaha komunikasi, dan sektor usaha usaha bangunan dan jasa perusahaan.

Jika industri peleburan timah mempunyai IDP sebesar 1,4595, hal ini berarti apabila terjadi peningkatan 1 unit output sektor tersebut akan

menyebabkan naiknya output sektor-sektor lain (termasuk sektor industri peleburan timah itu sendiri) secara keseluruhan sebesar 1,4595 unit. Dengan kata lain hal ini menyebabkan kenaikan penggunaan sektor lainnya sebagai input sebesar 1,4595 unit.

b) Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau *Backward Linkage Effect Ratio*

Keterkaitan ini menghitung total output yang tercipta akibat meningkatnya output suatu sektor melalui mekanisme distribusi output dalam perekonomian. Peningkatan output pada suatu sektor tertentu, maka output tersebut akan didistribusikan ke sektor-sektor usaha lainnya termasuk sektor usaha itu sendiri.

Sepuluh sektor utama dengan IDK tertinggi menurut analisis Tabel I-O tahun 2005 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Sepuluh Sektor Utama Menurut Indeks Derajat Kepekaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005

Peringkat	Kode	Sektor	IDK
1	31	Perdagangan	2,4889
2	10	Perikanan	1,5734
3	30	Bangunan	1,5147
4	12	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,4571
5	1	Padi	1,4223
6	25	Industri Besi dan Baja	1,3937
7	40	Usaha Bangunan dan Jasa Perusahaan	1,3325
8	5	Kelapa Sawit	1,3100
9	11	Penambangan Timah	1,2540
10	3	Lada	1,1878

Sumber: Buku Tabel Input Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005, BPS 2006.

Dari Tabel 4 dapat kita ketahui bahwa sektor usaha yang mempunyai nilai IDK paling tinggi adalah sektor usaha perdagangan dengan nilai 2,4889, kemudian sektor usaha perikanan dengan nilai 1,5734, sektor usaha bangunan dengan nilai 1,5147, sektor usaha pertambangan dan penggalian lainnya dengan nilai 1,4571 dan sektor usaha padi dengan nilai 1,4223. Selanjutnya sektor usaha dengan nilai indeks peringkat 6 sampai dengan 10 adalah sektor usaha industri besi dan baja, sektor usaha bangunan dan jasa perusahaan, sektor usaha kelapa sawit, sektor usaha penambangan timah, dan sektor usaha lada.

Sektor usaha perdagangan dengan nilai indeks derajat kepekaan sebesar 2,4889 menunjukkan kenaikan 1 unit permintaan akhir seluruh sektor akan menyebabkan naiknya output sektor perdagangan sebesar 2,4889 unit.

c. Kelompok Sektor Usaha Berdasarkan IDP dan IDK

Berdasarkan IDP dan IDK sektor-sektor usaha yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Kelompok I adalah sektor-sektor yang mempunyai nilai IDP dan IDK di atas rata-rata (>1)
- Kelompok II adalah sektor-sektor yang mempunyai nilai IDP di atas rata-rata (>1) dan nilai IDK di bawah rata-rata (<1)
- Kelompok III adalah sektor-sektor yang mempunyai nilai IDP di bawah rata-rata (<1) dan nilai IDK di atas rata-rata (>1)
- Kelompok IV adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP dan IDK di bawah rata-rata (<1).

Kelompok sektor usaha berdasarkan indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dari Tabel 5 dapat kita lihat sektor usaha yang masuk dalam kelompok I yaitu sektor-sektor usaha yang mempunyai nilai IDP dan IDK di atas rata-rata (>1) atau dalam analisis pengolahan Tabel I-O disebut sebagai sektor kunci (*key sectors*) ada 4 sektor yaitu sektor usaha bangunan, sektor usaha industri besi dan baja, sektor usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan sektor usaha komunikasi.

Sektor usaha bangunan mempunyai IDP sebesar 1,2705 serta IDK sebesar 1,5147. Hal itu mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan 1 unit output sektor bangunan mengakibatkan peningkatan output dari sektor-sektor lain (termasuk sektor usaha bangunan sendiri) secara keseluruhan sebesar 1,2705 unit. Dan akibat kenaikan 1 unit permintaan akhir seluruh sektor, maka output sektor ini akan meningkatkan sebesar 1,5147.

B. Pembahasan

Pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, atau daerah kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Perda;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Perda; dan
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk

Tabel 5. Indeks Daya penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan Menurut Kelompok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005

SEKTOR		DP	IDP	DK	IDK
Kelompok I (IDP >1 dan IDK >1)					
30	Bangunan	1,6711	1,2705	1,9923	1,5147
25	Industri Besi dan Baja	1,4681	1,1162	1,8332	1,3937
40	Usaha Bangunan dan Jasa Perusahaan	1,5120	1,1495	1,7527	1,3325
38	Komunikasi	1,5333	1,1657	1,3628	1,0361
Kelompok II (IDP >1 dan IDK <1)					
13	Industri Pengolahan dan pengawetan Ikan	1,8167	1,3812	1,2160	0,9245
26	Industri Peleburan Timah	1,9197	1,4595	1,0849	0,8248
14	Industri Minyak dan Lemak	1,8104	1,3764	1,0666	0,8109
15	Industri Penggilingan Padi	1,8414	1,4000	1,0087	0,7669
17	Industri Kerupuk	1,7305	1,3156	1,0705	0,8139
16	Industri Penggilingan Lada	1,6974	1,2905	1,0040	0,7633
19	Industri Barang dari Kayu dan Hasil Hutan	1,4510	1,1031	1,2000	0,9123
33	Restoran	1,3985	1,0633	1,2312	0,9360
35	Angkutan Udara	1,3668	1,0392	1,2410	0,9435
23	Industri Batu Bata & Genteng dari tanah liat	1,5870	1,2066	1,0151	0,7718
28	Industri Barang lainnya	1,4564	1,1072	1,0334	0,7856
18	Industri Makanan, Minuman & Tembakau Lainnya	1,4233	1,0821	1,0447	0,7942
27	Industri Mesin, Alat angkutan & perbaikannya	1,3509	1,0271	1,0537	0,8011
37	Jasa Penunjang Angkutan	1,3270	1,0089	1,0395	0,7903
7	Walet	1,3393	1,0183	1,0000	0,7603
Kelompok III (IDP <1 dan IDK >1)					
31	Perdagangan	1,1625	0,8838	3,2736	2,4889
10	Perikanan	1,1096	0,8436	2,0695	1,5734
12	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,1085	0,8428	1,9165	1,4571
1	Padi	1,0697	0,8133	1,8708	1,4223
5	Kelapa Sawit	1,1746	0,8930	1,7230	1,3100
11	Penambangan Timah	1,1925	0,9066	1,6494	1,2540
4	Karet	1,2343	0,9384	1,4908	1,1335
3	Lada	1,1053	0,8403	1,5623	1,1878
29	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,1339	0,8621	1,5048	1,1440
34	Angkutan Jalan Raya	1,1781	0,8957	1,4152	1,0759
9	Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	1,1340	0,8622	1,3546	1,0299
Kelompok IV (IDP <1 dan IDK <1)					
44	Jasa Perorangan & Rumahtangga	1,2472	0,9482	1,1472	0,8722
24	Industri Semen dan Barang-barang dari semen	1,2124	0,9218	1,1304	0,8594
42	Jasa Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemasyarakatan	1,1833	0,8996	1,1149	0,8477
39	Bank & Lembaga Keuangan	1,1228	0,8536	1,1527	0,8763
2	Tanaman Bahan Makanan Lainnya	1,0494	0,7978	1,2160	0,9245
32	Hotel	1,2405	0,9431	1,0105	0,7683
8	Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,1175	0,8496	1,1282	0,8578
36	Angkutan laut, Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	1,1406	0,8671	1,1033	0,8388
6	Tanaman Perkebunan Lainnya	1,1390	0,8660	1,0777	0,8194
43	Jasa Hiburan & Rekreasi	1,1860	0,9017	1,0086	0,7668
21	Industri Kimia	1,1684	0,8883	1,0040	0,7633
20	Industri Kertas dan Barang Cetak	1,0782	0,8197	1,0050	0,7641
41	Pemerintahan Umum dan Pertahanan	1,0000	0,7603	1,0100	0,7679
22	Pengilangan Minyak Bumi	1,0000	0,7603	1,0000	0,7603
45	Kegiatan yang tak Jelas batasannya	1,0000	0,7603	1,0000	0,7603

Sumber: Buku Tabel Input Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005, BPS 2006.

jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah pusat.

Rencana pembangunan ini yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan program operasional setiap tahunnya. Pembiayaan kegiatan dan program tersebut tercantum dalam rencana belanja daerah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2013 sesuai dengan yang tercantum dalam RAPBN tahun 2013 diharapkan adanya perbaikan kualitas belanja daerah (*quality of spending*), sehingga sumber-sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program dan kegiatan yang mempunyai nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

Salah satu unsur dalam peningkatan belanja yang berkualitas yaitu efisiensi alokasi, di mana ditekankan perlunya alokasi anggaran yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil serta diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan

nilai tambah dan manfaat luas bagi masyarakat. Nilai tambah yang besar bagi masyarakat diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penciptaan lapangan pekerjaan (*pro job*), penurunan kemiskinan secara nyata dan terukur (*pro poor*), dan/atau mendukung kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*).

Untuk level nasional dan level provinsi telah tersedia suatu alat analisis yang tepat dalam mendukung penggunaan dana belanja negara maupun daerah agar lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu Tabel I-O yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Tabel I-O merupakan gambaran perekonomian suatu negara atau daerah serta keterkaitan antar sektor usaha dalam perekonomian tersebut.

Analisis yang dapat digunakan pada Tabel I-O antara lain adalah IDP dan IDK. Dengan mengetahui sektor usaha mana yang mempunyai IDP tinggi maka kita dapat mengetahui sektor usaha yang mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) yang tinggi. Nilai IDP menunjukkan perubahan *output* seluruh sektor ekonomi termasuk sektor itu sendiri apabila ada perubahan permintaan akhir sektor tersebut. Sementara dengan mengetahui sektor usaha mana yang mempunyai IDK tinggi kita dapat mengetahui sektor usaha yang mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkages*) yang tinggi, di mana apabila terjadi perubahan permintaan akhir pada seluruh sektor maka sektor dengan IDK tertinggi adalah yang paling tinggi perubahan outputnya.

Apabila nilai IDP dan IDK >1 maka berdasarkan analisis Tabel I-O sektor tersebut disebut sebagai sektor kunci (*key sectors*) di mana perubahan permintaan akhir pada sektor tersebut akan mempengaruhi output seluruh sektor perekonomian (termasuk sektor itu sendiri), kemudian perubahan output seluruh sektor akan mempengaruhi output sektor tersebut, hal ini berlangsung terus menerus dan menciptakan *multiplier effect* dalam perekonomian.

Analisis hasil pengolahan Tabel I-O merupakan informasi yang dibutuhkan untuk dapat melakukan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam APBD. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih baik daripada perencanaan tanpa memperhatikan hasil analisis Tabel I-O.

Pada studi kasus yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa sektor kunci pada provinsi ini menurut pengolahan Tabel Input Output Tahun 2005 adalah sektor usaha bangunan, sektor usaha industri besi dan baja, sektor

usaha usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan sektor usaha komunikasi.

Di lain sisi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun misi pembangunan daerah yang hendak dicapai pada periode tahun 2007-2012 yang disebut Dasa Bhakti Era EMAS.¹⁰ Misi tersebut salah satunya adalah meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah yaitu Kelautan, Pertambangan dan Energi, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perbankan dan Penanaman Modal. Misi ini kemudian menjadi program kerja yang harus dijalankan oleh pemerintah provinsi selama 5 tahun. Indikasi dari penetapan misi pembangunan daerah ini adalah belanja daerah yang dikeluarkan selama periode ini juga tentunya diarahkan untuk pengeluaran yang mendukung sektor-sektor unggulan tersebut.

Dapat kita lihat disini bahwa pada penetapan sektor unggulan daerah yang masuk dalam misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memperhatikan analisis hasil pengolahan Tabel I-O Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfokuskan belanja negaranya pada sektor-sektor usaha yang menjadi sektor kunci dalam perekonomian, maka dana yang dikeluarkan dapat menciptakan nilai tambah dan *multiplier effect* yang lebih besar pada perekonomian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sepuluh sektor usaha yang memiliki nilai Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau tingkat dampak keterkaitan ke depan (*forward linkage effect ratio*) berdasarkan analisis Tabel I-O tahun 2005 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah (1) sektor usaha industri peleburan timah; (2) sektor usaha industri penggilingan padi; (3) sektor usaha industri pengolahan dan pengawetan ikan; (4) sektor usaha industri minyak dan lemak; (5) sektor usaha industri kerupuk; (6) sektor usaha industri penggilingan lada; (7) sektor usaha bangunan; (8) sektor usaha industri batu bata dan genteng dari tanah liat; (9) sektor usaha komunikasi; dan (10) sektor usaha usaha bangunan dan jasa perusahaan.

Sepuluh sektor usaha yang memiliki Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect ratio*) berdasarkan analisis Tabel I-O tahun 2005 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah (1) sektor usaha perdagangan; (2) sektor usaha perikanan; (3) sektor usaha bangunan; (4) sektor usaha pertambangan dan

¹⁰ "Dasa Bhakti Era EMAS Sebagai Misi Daerah", (<http://www.babelprov.go.id/content/dasa-bhakti-era-emas-sebagai-misi-daerah>, diakses 23 Januari 2013).

penggalian lainnya; (5) sektor usaha padi; (6) sektor usaha industri besi dan baja; (7) sektor usaha bangunan dan jasa perusahaan; (8) sektor usaha kelapa sawit; (9) sektor usaha penambangan timah; dan (10) sektor usaha lada.

Sektor kunci (*key sectors*) berdasarkan analisis Tabel I-O tahun 2005 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sektor usaha bangunan, sektor usaha industri besi dan baja, sektor usaha bangunan dan jasa perusahaan dan sektor usaha komunikasi

Sektor unggulan yang ditetapkan dalam Misi Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kelautan, Pertambangan dan Energi, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perbankan dan Penanaman Modal.

Penetapan sektor unggulan daerah yang masuk dalam misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memperhatikan analisis hasil pengolahan Tabel *Input Output*.

B. Saran

Hendaknya analisis yang dihasilkan dari pengolahan Tabel *Input Output* baik *level* Nasional dan Daerah dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan.

Analisis Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau tingkat dampak keterkaitan ke depan (*forward linkage effect ratio*), Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect ratio*) dan sektor kunci (*key sectors*) dari hasil pengolahan Tabel *Input Output* memiliki dampak nilai tambah dan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian. Analisis dari hasil pengolahan Tabel I-O ini tersedia di Badan Pusat Statistik seluruh Indonesia yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah setempat.

Dimungkinkan analisis lanjutan yang dilakukan adalah berdasarkan Tabel I-O per kabupaten/kota, agar tujuan penggunaan dana belanja daerah yang lebih berkualitas dapat terwujud sampai dengan *level* kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik. *Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Tabel Input Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005*. Pangkalpinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2006.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Buku III Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah dan Antar Daerah*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2010.

Tulisan dalam Internet

"Selayang Pandang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung". (<http://www.babelprov.go.id/>, diakses 13 Maret 2013).

"Dasa Bhakti Era EMAS Sebagai Misi Daerah". (<http://www.babelprov.go.id/content/dasa-bhakti-era-emas-sebagai-misi-daerah>, diakses 23 Januari 2013).

"Menkeu Tetapkan Belanja Berkualitas dalam RAPBN 2013". (http://www.analisadaily.com/news/read/2012/08/15/68915/menkeu_tetapkan_belanja_berkualitas_dalam_rapbn_2013/, diakses 23 Januari 2013).

"Belanja Berkualitas Harus penuhi 3 Unsur Efisiensi". (http://www.investor.co.id/home/belanja-berkualitas-harus-penuhi-3-unsur-efisiensi/49114#Scene_1, diakses 23 Januari 2013).

Vinod Thomas. "The Quality of "Public Service Operation", (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=193>, diakses 25 September 2013). Spending". *The Straits Times* 24 November 2009. (http://siteresources.worldbank.org/EXTDIRGEN/Resources/StraitsTimes_QualityofSpending.pdf, diakses 14 Maret 2013).

Dokumen

Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat.